el-Huda 17(2) (2026)

Jurnal el-Huda: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan

https://ejurnal.iaiqh.ac.id/index.php/el-huda

Internalisasi Nilai Pancasila sebagai Landasan Etika Digital: Kajian Konseptual dalam Pendidikan

Sri Rahayu Simanullang[1], Aprilia Hutabarat[2], Kaisyah Abellia Riadi[3], Putri Olivia Munthe[4], Abraem Prayenta Sinulingga[5], Yobel Tarigan[6], Anugrah Setiawan[7]

[1,2,3,4] Universitas Negeri Medan, Indonesia.

DOI: https://doi.org/10.59702/el-huda.v17i02.450

Jurnal Info
Dikirim: 28/03/2026
Revisi: 19/10/2026
Diterima: 21/10/2026

Korespondensi:

Phone: +6285165166174

Abstract: The development of digital technology presents ethical challenges in online interactions, including the spread of unverified information, hate speech, and cyberbullying. Although Pancasila values are often regarded as a moral foundation for social life, the conceptual relationship between value internalization, digital ethics development, and the role of education requires further clarification. This article aims to analyze the relationship between the internalization of Pancasila values and the development of digital ethics in educational contexts. The study employs a literature review method with a descriptive qualitative approach by examining relevant books, scientific journals, research articles, and academic publications. Information from the literature is grouped according to themes related to the internalization of Pancasila values, digital ethics, challenges in value implementation, and strengthening strategies. The information is then compared to develop a conceptual synthesis. The review leads to a conceptual mapping of the relationship between Pancasila values as a normative foundation, internalization through education and habituation, and digital behavior characterized by responsibility, respect for differences, honesty, and self-regulation. Digital literacy and support from families and educational environments are positioned as supporting factors, while the circulation of unverified information and inadequate self-regulation present challenges to implementation. The article offers a conceptual framework linking Pancasila values, internalization processes, supporting factors, and ethical behavior in digital spaces. This framework may provide a foundation for developing digital ethics education based on Pancasila values, although its application requires empirical testing.

Keywords: internalization of Pancasila values, digital ethics, character education, digital literacy, conceptual review.

Abstrak: Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan etika dalam interaksi daring, seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, dan perundungan siber. Meskipun nilai-nilai Pancasila kerap diposisikan sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan konseptual antara proses internalisasi nilai, pembentukan etika digital, dan peran pendidikan masih perlu dijelaskan secara lebih terarah. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan internalisasi nilai Pancasila dengan pembentukan etika digital dalam konteks pendidikan. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik yang relevan. Informasi dari literatur dikelompokkan berdasarkan tema internalisasi nilai Pancasila, etika digital, tantangan penerapan nilai, dan strategi penguatannya, kemudian dibandingkan untuk menyusun sintesis konseptual. Hasil kajian mengarah pada pemetaan hubungan antara nilai Pancasila sebagai landasan normatif, proses internalisasi melalui pendidikan dan pembiasaan, serta perilaku digital yang mencerminkan tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, kejujuran, dan pengendalian diri. Literasi digital dan dukungan lingkungan keluarga serta pendidikan diposisikan sebagai faktor pendukung, sedangkan arus informasi yang tidak terverifikasi dan lemahnya pengendalian diri menjadi tantangan penerapannya. Secara konseptual, artikel ini menawarkan kerangka hubungan antara nilai Pancasila, proses internalisasi, faktor pendukung, dan perilaku etis di ruang digital. Kerangka tersebut dapat menjadi landasan bagi pengembangan pembelajaran etika digital berbasis nilai Pancasila, tetapi penerapannya masih memerlukan pengujian empiris.

Kata kunci: internalisasi nilai Pancasila, etika digital, pendidikan karakter, literasi digital, kajian konseptual.

Email: rsri44288@gmail.com

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, komunikasi, dan kehidupan sosial. Perubahan tersebut ditunjukkan oleh semakin luasnya penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221,56 juta orang dengan tingkat penetrasi sebesar 79,5% dari jumlah penduduk. Tingginya penggunaan internet menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk kelompok usia muda yang banyak menggunakan media sosial dan berbagai platform digital untuk memperoleh informasi serta berkomunikasi. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan persoalan etika, seperti penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, perundungan siber, dan penyalahgunaan teknologi. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan teknologi perlu disertai dengan kemampuan memahami konsekuensi sosial dan moral dari setiap tindakan di ruang digital. Dengan demikian, tantangan transformasi digital bukan hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan perilaku yang bertanggung jawab dan beretika.

Dalam konteks tersebut, etika digital dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang menjadi pedoman individu dalam menggunakan teknologi serta berinteraksi di ruang digital. Etika digital mencakup kemampuan mempertimbangkan dampak tindakan, menghargai orang lain, menjaga privasi, menyaring informasi, serta bertanggung jawab terhadap konten yang dibuat maupun disebarkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021) menempatkan etika digital sebagai salah satu bagian penting dalam literasi digital yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam bersikap dan berperilaku secara tepat di ruang digital. Kerangka literasi digital Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah digunakan untuk menelaah etika digital mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta (Pamungkas et al., 2024). Sementara itu, internalisasi nilai merupakan proses ketika nilai tidak berhenti pada tahap pengetahuan, tetapi dipahami, dihayati, dan diwujudkan dalam perilaku. Dalam perspektif pendidikan karakter, Koesoema (2010) dan Samani dan Hariyanto (2012) menekankan bahwa pembentukan karakter membutuhkan proses pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan yang dilakukan secara berkelanjutan. Hidayat et al. (2022) melaporkan bahwa guru pada berbagai jenjang sekolah menginternalisasikan nilai karakter terutama melalui pembiasaan, integrasi nilai dalam pembelajaran, dan peniruan atau keteladanan. Pancasila dalam konteks ini dapat diposisikan sebagai sumber nilai yang memberikan arah moral bagi perilaku digital. Nilai kemanusiaan dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap orang lain, nilai persatuan melalui sikap menjaga toleransi, nilai kerakyatan melalui penghargaan terhadap perbedaan pendapat, dan nilai keadilan sosial melalui penggunaan teknologi secara bertanggung jawab. Dengan demikian, internalisasi Pancasila tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap lima sila, tetapi juga dengan proses menerjemahkan nilai tersebut menjadi perilaku nyata dalam kehidupan digital.

Sejumlah penelitian dan literatur sebelumnya telah membahas hubungan Pancasila, pendidikan karakter, literasi digital, dan etika digital. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (2020) menempatkan nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan Kemendikbud (2017) menekankan pendidikan karakter sebagai bagian penting dalam proses pendidikan. Dalam konteks digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021) menempatkan etika sebagai salah satu unsur penting dalam literasi digital karena penggunaan teknologi membutuhkan tanggung jawab dan kesadaran terhadap dampak tindakan pengguna. Internalisasi nilai karakter pada siswa telah dikaji, antara lain pada jenjang madrasah ibtidaiyah (Noviannda et al., 2020), sedangkan peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital dibahas oleh Triyanto (2020). Kajian mengenai Pancasila dan etika digital juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai pedoman untuk membangun perilaku digital yang santun, bertanggung jawab, toleran, dan kritis (Julianto et al., 2025; Sartika et al., 2022; Yusuf et al., 2024). Meskipun demikian, penelitian sebelumnya masih memiliki kecenderungan untuk membahas pendidikan karakter, Pancasila, literasi digital, dan etika digital sebagai aspek yang berdiri sendiri. Artikel ini memandang bahwa hubungan antara ketiga konsep tersebut perlu dijelaskan secara lebih terintegrasi, khususnya mengenai bagaimana nilai Pancasila diinternalisasikan melalui pendidikan dan pembiasaan, kemudian diwujudkan dalam perilaku etis di ruang digital. Kebutuhan untuk memperjelas hubungan tersebut juga sesuai dengan fokus artikel yang sejak awal menempatkan hubungan internalisasi nilai Pancasila, pembentukan etika digital, dan peran pendidikan sebagai persoalan utama kajian.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual hubungan antara internalisasi nilai-nilai Pancasila dan pembentukan etika digital dalam konteks pendidikan serta menjelaskan kontribusinya terhadap pembentukan karakter generasi unggul. Karena penelitian menggunakan metode studi kepustakaan, kajian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur pengaruh secara empiris, tetapi untuk menyusun sintesis berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Secara khusus, kajian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana proses internalisasi nilai Pancasila dapat menjadi dasar pembentukan etika digital, bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku ketika menggunakan teknologi, serta bagaimana etika digital berbasis Pancasila dapat mendukung pembentukan karakter generasi unggul. Dalam kerangka tersebut, Indonesia Emas 2045 tidak diposisikan sebagai akibat langsung dari internalisasi Pancasila, melainkan sebagai konteks pembangunan sumber daya manusia yang membutuhkan karakter, integritas, kemampuan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak. Kerangka konseptual tersebut sejalan dengan hasil kajian dalam artikel yang menempatkan nilai Pancasila sebagai landasan normatif, proses internalisasi melalui pendidikan dan pembiasaan, serta perilaku digital yang mencerminkan tanggung jawab, penghormatan terhadap perbedaan, kejujuran, dan pengendalian diri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Moleong, 2017) dengan desain *kajian pustaka naratif yang bersifat konseptual*. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur pengaruh secara empiris, melainkan menelaah, membandingkan, dan menyintesis konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu tentang internalisasi nilai Pancasila, etika digital, dan pendidikan karakter agar diperoleh pemahaman yang terpadu. Kajian ini bukan tinjauan sistematis karena penelusurannya bersifat terarah, yaitu berfokus pada sumber yang paling relevan dengan konsep kunci, dan tidak mengikuti protokol tertutup yang bertujuan menjaring seluruh publikasi yang tersedia. Sebagai gantinya, prosedur pemilihan dan analisis sumber diuraikan secara terbuka agar dapat ditelusuri ulang. Hasil kajian diposisikan sebagai sintesis konseptual berupa proposisi teoretis, bukan bukti empiris tentang hubungan sebab akibat.

Data penelitian berupa data sekunder yang terdiri atas tiga kelompok sumber, yaitu (a) buku dan karya teoretis yang menjelaskan konsep Pancasila, internalisasi nilai, dan pendidikan karakter; (b) dokumen kebijakan dan publikasi resmi lembaga pemerintah yang relevan, seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika; serta (c) artikel jurnal ilmiah yang membahas hubungan konsep-konsep tersebut dalam konteks pendidikan dan ruang digital. Penelusuran bersifat terarah (purposif), yaitu difokuskan pada sumber yang secara langsung membahas konsep kunci penelitian, bukan pada seluruh publikasi yang tersedia. Jenis sumber, kata kunci, periode publikasi, dan kriteria seleksi dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Strategi Penelusuran dan Kriteria Seleksi Literatur

Komponen	Uraian
Jenis sumber	Buku dan karya teoretis tentang Pancasila, internalisasi nilai, dan pendidikan karakter; dokumen resmi BPIP, Kemendikbud, dan Kemenkominfo; artikel jurnal ilmiah tentang pendidikan dan ruang digital.
Kata kunci	Bahasa Indonesia: "internalisasi nilai Pancasila", "etika digital", "pendidikan karakter", "literasi digital", "generasi muda". Bahasa Inggris: "Pancasila values internalization", "digital ethics", "character education", "digital citizenship". Kata kunci dikombinasikan sesuai kebutuhan untuk menemukan sumber yang menghubungkan dua konsep atau lebih.
Periode publikasi	2010 sampai 2021.
Kriteria inklusi	(1) Membahas secara eksplisit sekurang-kurangnya dua dari tiga konsep kunci, yaitu nilai Pancasila atau internalisasi nilai, etika atau literasi digital, dan pendidikan karakter. (2) Berkonteks Indonesia atau memuat teori yang relevan dengan konteks tersebut. (3) Berbahasa Indonesia atau Inggris dan dapat dibaca secara lengkap. (4) Memenuhi pertimbangan mutu: artikel dimuat di jurnal ilmiah, buku diterbitkan penerbit akademik, dan dokumen diterbitkan lembaga yang berwenang.
Kriteria eksklusi	(1) Opini, blog, atau berita tanpa rujukan ilmiah. (2) Sumber tanpa identitas penulis atau penerbit yang jelas. (3) Sumber yang hanya menyinggung topik sekilas atau merupakan duplikasi.

Seleksi sumber dilakukan dengan membaca bagian awal setiap sumber, yaitu judul, abstrak, atau pengantar, kemudian membaca isinya secara lebih lengkap untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria pada Tabel 1. Penilaian mutu dilakukan secara kualitatif dan disesuaikan dengan jenis sumber. Buku teoretis dinilai dari otoritas penulis dan penerbit, dokumen kebijakan dari kewenangan lembaga penerbit, sedangkan artikel jurnal dinilai dari kejelasan metode, kesesuaian argumen dengan data atau teori yang dirujuk, serta reputasi jurnal.

Data dianalisis dengan analisis tematik kualitatif (Sugiyono, 2019) dengan unit analisis berupa konsep, definisi, proposisi, dan temuan dalam setiap sumber. Analisis dilakukan dalam lima tahap. Pertama, informasi diekstraksi ke dalam matriks yang memuat identitas sumber, jenis sumber, konsep yang dibahas, definisi, temuan atau argumen utama, dan keterbatasannya. Kedua, isi matriks dikode. Kategori awal dibentuk secara deduktif dari pertanyaan kajian dan konsep kunci (internalisasi nilai, etika digital, pendidikan karakter, dan generasi unggul), kemudian direvisi secara induktif sesuai isi literatur, misalnya digabung ketika maknanya tumpang tindih atau dipisah ketika fungsinya berbeda, seperti etika digital sebagai norma perilaku dan literasi digital sebagai kompetensi. Ketiga, kode dikelompokkan menjadi tema yang menjadi enam subbagian pembahasan (Tabel 2). Keempat, temuan dibandingkan antarsumber. Kelima, hasil disintesis secara konseptual dan ditarik menjadi simpulan. Tema-tema tersebut dihubungkan dengan tiga pertanyaan kajian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keterkaitan Pertanyaan Kajian, Fokus Analisis, dan Subbagian Pembahasan

Pertanyaan kajian	Fokus analisis	Subbagian pembahasan
Bagaimana proses internalisasi nilai Pancasila menjadi dasar pembentukan etika digital?	Definisi dan tahapan internalisasi nilai; mekanisme yang menghubungkan nilai dengan perilaku	1. Hakikat internalisasi nilai Pancasila; 3. Peran internalisasi sebagai fondasi etika digital
Bagaimana nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam perilaku ketika menggunakan teknologi?	Dimensi dan karakteristik etika digital; pemetaan sila Pancasila terhadap prinsip etika digital	2. Konsep dan karakteristik etika digital berbasis Pancasila; 5. Tantangan internalisasi
Bagaimana etika digital berbasis Pancasila mendukung pembentukan karakter generasi unggul?	Dimensi generasi unggul; jalur kontribusi dan implikasi pendidikan	4. Peran etika digital dalam mewujudkan generasi unggul; 6. Strategi penguatan internalisasi

Pembandingan dilakukan dengan mengelompokkan temuan setiap tema menjadi konvergen (sejalan), komplementer (saling melengkapi), dan divergen (bertentangan). Apabila ditemukan perbedaan posisi, penulis memeriksa asumsi, konteks, dan jenis sumber yang melatarbelakanginya. Perbedaan yang komplementer diintegrasikan, sedangkan perbedaan yang saling bertentangan dilaporkan apa adanya dan tidak dipaksakan menjadi satu simpulan. Sebagai contoh, modul etika digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021) menekankan kecakapan bersikap di ruang digital, sedangkan kajian pendidikan karakter (Koesoema, 2010; Samani & Hariyanto, 2012) menekankan pembiasaan dan keteladanan. Kedua penekanan ini dibaca sebagai komplementer karena yang pertama menjelaskan perilaku yang diharapkan dan yang kedua menjelaskan cara pembentukannya. Dalam penarikan simpulan, klaim dibedakan menjadi temuan penelitian terdahulu, kerangka teoretis, dan interpretasi penulis, dan interpretasi yang belum didukung bukti empiris dinyatakan sebagai proposisi konseptual.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu setiap klaim utama dibandingkan dengan sekurang-kurangnya dua jenis sumber yang berbeda, seperti teori, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian (Moleong, 2017). Keabsahan juga dijaga melalui jejak audit berupa matriks ekstraksi yang mencatat sumber dan lokasi rujukan setiap temuan, serta diskusi antarpenulis untuk menyepakati kode, kategori, dan simpulan. Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan. Cakupan literatur dibatasi pada sumber berbahasa Indonesia dan Inggris yang dapat diakses secara daring atau melalui perpustakaan, sehingga publikasi lain mungkin belum terjangkau. Penelusuran yang bersifat terarah juga tidak dilengkapi pencatatan basis data, tanggal, dan jumlah sumber pada setiap tahap, sehingga penelusuran ini tidak dapat diulang secara persis. Pemilihan sumber berpotensi mengandung bias seleksi, antara lain kecenderungan publikasi yang melaporkan hasil positif, dominasi sumber nasional, dan subjektivitas penulis dalam menilai relevansi. Untuk mengurangi bias tersebut, kriteria seleksi dinyatakan secara tertulis dan proses seleksi didiskusikan antarpenulis. Selain itu, karena tidak ada pengujian empiris, hasil kajian bersifat konseptual dan perlu diuji lebih lanjut melalui penelitian lapangan sebelum digeneralisasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Hasil Sintesis Literatur tentang Internalisasi Nilai Pancasila dan Etika Digital

Berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber yang telah dipilih, ditemukan bahwa internalisasi nilai Pancasila dalam konteks digital tidak berhenti pada penguasaan pengetahuan mengenai lima sila, tetapi berkaitan dengan proses menjadikan nilai tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam bersikap dan bertindak. Hasil ekstraksi literatur menunjukkan adanya keterkaitan antara literatur Pancasila, pendidikan karakter, dan etika digital. Literatur mengenai Pancasila memberikan landasan nilai, sedangkan literatur pendidikan karakter menjelaskan proses pembentukan sikap melalui pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan (Hidayat et al., 2022; Koesoema, 2010; Samani & Hariyanto, 2012). Sementara itu, literatur mengenai etika digital menjelaskan bentuk perilaku yang diharapkan ketika individu berinteraksi dan menggunakan teknologi.

Perbandingan antarsumber menunjukkan hubungan yang bersifat komplementer. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2021), misalnya, menempatkan etika digital pada kecakapan bersikap dan berperilaku di ruang digital, sedangkan Koesoema (2010) serta Samani dan Hariyanto (2012) menekankan pentingnya pendidikan karakter, pembiasaan, dan keteladanan. Kedua kelompok sumber tersebut tidak menunjukkan pertentangan, tetapi menjelaskan bagian yang berbeda dalam proses pembentukan perilaku: etika digital menjelaskan perilaku yang diharapkan, sedangkan pendidikan karakter menjelaskan proses pembentukan nilai yang mendasarinya.

Hasil sintesis selanjutnya menunjukkan adanya tahapan konseptual yang dapat dibedakan antara mengetahui nilai, memahami dan menyetujui nilai, menghayati nilai, serta menerapkan nilai dalam perilaku. Dengan demikian, pengetahuan mengenai Pancasila belum dapat langsung dianggap sebagai internalisasi. Internalisasi terlihat ketika nilai mulai digunakan sebagai pertimbangan dalam menghadapi situasi tertentu dan diwujudkan dalam kebiasaan perilaku.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, hubungan antara internalisasi dan etika digital dapat dirumuskan secara konseptual sebagai berikut:

pengetahuan nilai → pemahaman dan penerimaan nilai → penghayatan melalui pembiasaan dan keteladanan → pertimbangan moral dan pengendalian diri → perilaku digital yang sesuai dengan nilai.

Hubungan tersebut merupakan hasil sintesis konseptual dari literatur dan bukan hasil pengujian hubungan sebab-akibat. Hal ini sesuai dengan karakter penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dan tidak melakukan pengujian empiris. Dengan demikian, internalisasi Pancasila dalam artikel ini ditempatkan sebagai salah satu landasan pembentukan perilaku etis, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu.

Tabel 3. Pemetaan Nilai Pancasila, Prinsip Etika Digital, dan Indikator Perilaku

Nilai Pancasila	Prinsip etika digital yang disintesis	Indikator perilaku digital
Ketuhanan Yang Maha Esa	Kejujuran dan tanggung jawab moral	Memeriksa kebenaran sebelum menyebarkan informasi, tidak sengaja menyebarkan informasi palsu, dan mempertimbangkan dampak tindakan
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Penghormatan terhadap martabat dan hak orang lain	Menghindari cyberbullying, menggunakan bahasa yang santun, dan tidak menyebarkan konten yang merendahkan
Persatuan Indonesia	Toleransi dan menjaga keharmonisan	Tidak memperuncing perbedaan, tidak menyebarkan konten provokatif, dan menghargai keberagaman
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	Dialog dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat	Menyampaikan pendapat secara santun, memberikan alasan, mendengarkan pandangan berbeda, dan menghindari konflik yang tidak perlu
Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia	Penggunaan teknologi secara adil dan bertanggung jawab	Tidak melakukan penipuan, tidak menyalahgunakan data, menghargai hak pengguna lain, serta menyadari adanya kesenjangan akses dan kemampuan

Pemetaan tersebut merupakan hasil sintesis antara nilai Pancasila, literatur pendidikan karakter, dan konsep etika digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa kelima sila tidak diposisikan sebagai lima aturan digital yang berdiri sendiri, tetapi sebagai landasan normatif yang diterjemahkan ke dalam prinsip dan perilaku digital yang dapat diamati. Pemetaan ini sejalan dengan kajian Julianto et al. (2025) yang mengaitkan literasi media sosial dengan nilai kemanusiaan, toleransi, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial, serta dengan Yusuf et al. (2024) yang memosisikan Pancasila sebagai sumber etika digital.

2. Hasil Sintesis Konsep Etika Digital Berbasis Pancasila

Analisis sumber menunjukkan bahwa etika digital dan literasi digital memiliki fungsi yang berbeda meskipun keduanya saling mendukung. Etika digital berada pada tingkat norma dan perilaku, yaitu bagaimana seseorang seharusnya bertindak ketika menggunakan teknologi. Sementara itu, literasi digital berada pada tingkat kompetensi, yaitu kemampuan mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi serta teknologi secara tepat.

Dari hasil pengelompokan literatur, ditemukan tiga kelompok unsur. Pertama, nilai dasar, yang mencakup tanggung jawab, penghormatan terhadap manusia, toleransi, keadilan, dan kejujuran. Kedua, kompetensi pendukung, terutama kemampuan literasi digital untuk mengevaluasi informasi dan memahami risiko penggunaan teknologi. Ketiga, perilaku yang dapat diamati, seperti memverifikasi informasi, berkomunikasi secara santun, menghormati perbedaan, menjaga data, dan mempertimbangkan dampak tindakan.

Perbandingan dengan kerangka etika digital umum menunjukkan bahwa tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, perlindungan terhadap data, dan kemampuan menghadapi informasi secara kritis bukan hanya dimiliki oleh pendekatan berbasis Pancasila. Unsur-unsur tersebut juga merupakan bagian dari pembahasan etika digital secara lebih luas. Kontribusi Pancasila terletak pada pemberian landasan normatif yang menghubungkan perilaku digital dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa prinsip keadilan perlu dipahami secara lebih kritis. Keadilan digital tidak berarti bahwa seluruh masyarakat berada dalam kondisi akses teknologi yang sama. Perbedaan fasilitas, kemampuan,

infrastruktur, dan kondisi sosial membuat pengalaman digital setiap individu berbeda. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai penggunaan teknologi yang tidak merugikan pihak lain sekaligus adanya kesadaran terhadap kesenjangan akses dan kemampuan.

3. Hasil Sintesis Hubungan Internalisasi, Lingkungan, dan Perilaku Digital

Hasil perbandingan sumber menunjukkan bahwa internalisasi nilai tidak bekerja secara terpisah dari lingkungan. Literatur pendidikan karakter menunjukkan pentingnya pembiasaan dan keteladanan, sedangkan literatur etika digital menunjukkan perlunya kemampuan menerapkan prinsip moral ketika menghadapi situasi digital. Dari kedua kelompok sumber tersebut diperoleh hubungan yang bersifat komplementer.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam hubungan tersebut, yaitu nilai, proses pembentukan, dan perilaku. Nilai Pancasila menjadi dasar normatif; pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial menjadi ruang pembentukan; sedangkan perilaku digital merupakan bentuk penerapan nilai dalam situasi nyata.

Pada saat yang sama, penerapan nilai dapat dipengaruhi oleh faktor individu dan lingkungan digital. Tekanan kelompok, anonimitas, arus informasi yang cepat, dan karakteristik platform (Bhargava & Velasquez, 2021) dapat membuat penerapan nilai menjadi lebih sulit. Dengan demikian, hasil kajian tidak menunjukkan bahwa seseorang yang mengetahui atau menyetujui nilai Pancasila secara otomatis akan selalu berperilaku sesuai nilai tersebut di ruang digital.

Sintesis tersebut menghasilkan model konseptual bahwa internalisasi merupakan salah satu fondasi yang bekerja melalui pemahaman, pembiasaan, keteladanan, pertimbangan moral, dan pengendalian diri, tetapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi kondisi individu dan lingkungan.

4. Hasil Sintesis Dimensi Generasi Unggul dan Etika Digital

Hasil kajian menunjukkan bahwa istilah generasi unggul dalam konteks artikel ini lebih tepat dipahami sebagai gambaran generasi yang memiliki keseimbangan antara kemampuan, keterampilan, dan karakter. Dari seluruh unsur yang ditemukan dalam literatur, dimensi yang paling relevan dengan etika digital adalah tanggung jawab, berpikir kritis, komunikasi yang santun, kemampuan menghargai perbedaan, integritas, dan kemampuan bekerja sama.

Hubungan antara etika digital dan dimensi tersebut bersifat kontribusional. Kemampuan memeriksa informasi sebelum menyebarkannya berkaitan dengan praktik berpikir kritis. Penggunaan bahasa yang santun dan penghargaan terhadap perbedaan berkaitan dengan kualitas komunikasi dan kehidupan sosial. Sementara itu, tanggung jawab, kejujuran, dan konsistensi perilaku berkaitan dengan integritas.

Namun, hasil sintesis tidak menunjukkan bahwa etika digital merupakan satu-satunya faktor pembentuk generasi unggul. Pendidikan, kemampuan akademik, keterampilan, dukungan keluarga, lingkungan sosial, akses teknologi, dan kondisi masyarakat juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi perkembangan generasi muda. Oleh karena itu, Indonesia Emas 2045 dalam kajian ini diposisikan sebagai konteks kebijakan dan orientasi jangka panjang, bukan sebagai dampak yang telah terbukti secara empiris.

5. Hasil Identifikasi Tantangan Internalisasi Nilai Pancasila

Hasil pengelompokan literatur menunjukkan bahwa tantangan internalisasi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat analisis. Pada tingkat individu, tantangan berkaitan dengan pengendalian diri dan kemampuan mengevaluasi informasi. Pada tingkat keluarga dan sekolah, tantangan berkaitan dengan pembiasaan, keteladanan, pendampingan, dan konsistensi pendidikan nilai. Pada tingkat masyarakat, tantangan berkaitan dengan budaya komunikasi dan lingkungan sosial. Sementara itu, pada tingkat ruang digital, tantangan berkaitan dengan anonimitas, arus informasi yang cepat, penyebaran konten, serta karakteristik platform (Bhargava & Velasquez, 2021). Triyanto (2020) juga mengidentifikasi perundungan siber serta keamanan dan keselamatan sebagai tantangan pendidikan karakter di era digital.

Arus informasi yang tidak terverifikasi menjadi salah satu persoalan yang berulang dalam pembahasan sumber. Namun, istilah "rendahnya literasi digital" tidak diperlakukan sebagai temuan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia karena kajian ini tidak melakukan pengukuran populasi. Istilah tersebut dipahami sebagai salah satu persoalan yang diidentifikasi dalam literatur dan perlu dibatasi berdasarkan konteks penelitian yang digunakan oleh sumber.

Globalisasi juga ditemukan sebagai faktor yang perlu dibahas secara lebih hati-hati. Hasil sintesis tidak menunjukkan bahwa seluruh pengaruh budaya luar bersifat negatif. Pertukaran budaya dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru. Tantangan muncul ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk menilai, memilih, dan menyesuaikan pengaruh tersebut dengan nilai yang diyakini.

Selain itu, ditemukan adanya dilema antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial. Individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi penggunaan kebebasan tersebut tetap perlu mempertimbangkan martabat orang lain, dampak sosial, serta risiko penyebaran informasi yang merugikan.

6. Hasil Sintesis Strategi Penguatan Internalisasi

Hasil kajian mengidentifikasi enam arah strategi, yaitu pendidikan, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemanfaatan konten digital, dan pengendalian diri individu. Keenam strategi tersebut tidak memiliki kedudukan bukti yang sama. Strategi pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan memiliki dasar yang lebih jelas dalam literatur pendidikan karakter, sedangkan penggunaan konten digital sebagai sarana penguatan lebih tepat ditempatkan sebagai strategi konseptual yang masih membutuhkan pengujian efektivitas.

Hasil sintesis juga menunjukkan bahwa strategi perlu dihubungkan dengan tantangan. Masalah kesulitan memverifikasi informasi dapat direspons melalui penguatan literasi digital dan latihan evaluasi informasi. Masalah kurangnya

pembiasaan dapat direspons melalui keteladanan dan pembiasaan di sekolah maupun keluarga. Sementara itu, persoalan perilaku spontan di ruang digital dapat direspons melalui pengembangan pengendalian diri dan latihan pengambilan keputusan etis.

Dari hasil kajian, indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan perilaku antara lain kemampuan memverifikasi informasi, kemampuan memberikan alasan ketika memilih atau menolak suatu informasi, kualitas argumentasi digital, penghormatan terhadap perbedaan, kesantunan berkomunikasi, serta kesadaran terhadap perlindungan data.

Pembahasan

1. Internalisasi Nilai Pancasila sebagai Mekanisme Pembentukan Etika Digital

Hasil sintesis memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam memahami internalisasi adalah membedakannya dari sekadar pengetahuan tentang Pancasila. Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan lima sila, kondisi tersebut belum menunjukkan bahwa nilai telah terinternalisasi. Internalisasi baru memiliki makna lebih kuat ketika nilai dipahami, diterima, dihayati, dan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perbedaan fungsi antara literatur Pancasila dan pendidikan karakter. Literatur Pancasila memberikan substansi nilai yang menjadi pedoman, sedangkan Koesoema (2010) serta Samani dan Hariyanto (2012) memberikan penjelasan mengenai pentingnya proses pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan. Ketika kedua kelompok sumber tersebut disatukan, proses internalisasi dapat dipahami sebagai proses bergerak dari pengetahuan menuju penghayatan dan praktik.

Dalam ruang digital, proses tersebut menjadi penting karena keputusan sering kali harus dibuat secara cepat dan tanpa pengawasan langsung. Ketika seseorang menerima informasi yang belum terverifikasi, misalnya, nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak cukup hanya diketahui. Nilai tersebut perlu menjadi dasar untuk mempertimbangkan apakah informasi layak dipercaya dan disebarkan. Demikian pula ketika menghadapi perbedaan pendapat, nilai kemanusiaan dan persatuan perlu diterjemahkan menjadi kemampuan mengendalikan emosi dan menghargai orang lain. Hidayat et al. (2022) juga melaporkan bahwa guru merasa lebih sulit menginternalisasikan dan menerapkan nilai karakter dalam pembelajaran virtual karena terbiasa dengan interaksi tatap muka.

Dengan demikian, pengendalian diri dapat ditempatkan sebagai salah satu mekanisme yang menghubungkan nilai dengan perilaku. Namun, hubungan tersebut harus dipahami sebagai proposisi konseptual. Artikel ini tidak memiliki data empiris yang dapat membuktikan bahwa tingkat internalisasi tertentu secara langsung menyebabkan peningkatan pengendalian diri atau perilaku etis.

2. Kontribusi Pancasila terhadap Konsep Etika Digital

Pembahasan mengenai etika digital berbasis Pancasila perlu membedakan antara unsur yang bersifat universal dan kontribusi yang lebih khas dari Pancasila. Tanggung jawab, penghormatan terhadap orang lain, perlindungan data, dan kemampuan menilai informasi merupakan prinsip yang juga ditemukan dalam konsep etika digital secara umum. Karena itu, prinsip-prinsip tersebut tidak dapat diklaim sebagai sesuatu yang hanya dimiliki oleh pendekatan Pancasila.

Kontribusi Pancasila lebih terlihat pada cara prinsip tersebut ditempatkan dalam kerangka nilai bangsa. Ketuhanan memberikan dasar pertimbangan moral; kemanusiaan mengarahkan penggunaan teknologi agar tetap menghormati martabat manusia; persatuan mengarahkan pengguna untuk menjaga keharmonisan; kerakyatan memberikan dasar bagi dialog dan penghargaan terhadap perbedaan; sedangkan keadilan sosial mengarahkan penggunaan teknologi agar tidak merugikan pihak lain dan tetap memperhatikan persoalan kesenjangan.

Dengan kerangka tersebut, etika digital berbasis Pancasila tidak dimaksudkan untuk menggantikan konsep etika digital umum, tetapi memberikan konteks nilai yang sesuai dengan pendidikan di Indonesia. Hal ini penting karena pendidikan etika digital tidak cukup hanya mengajarkan "apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan", tetapi juga perlu membangun alasan moral mengapa suatu tindakan dianggap tepat atau tidak tepat. Pendekatan ini sejalan dengan Yusuf et al. (2024) yang memosisikan Pancasila sebagai sumber etika digital melalui pendidikan kewargaan digital, serta Julianto et al. (2025) yang melaporkan bahwa literasi media sosial berbasis nilai Pancasila berkaitan dengan etika digital yang lebih kuat dan perilaku pencegahan ujaran kebencian daring.

Perbedaan etika digital dan literasi digital juga menjadi penting. Seseorang dapat memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan mengevaluasi informasi, tetapi belum tentu menggunakan kemampuan tersebut secara etis. Sebaliknya, kesadaran etis tanpa kemampuan mengevaluasi informasi juga dapat membuat seseorang kesulitan mengambil keputusan yang tepat. Oleh sebab itu, keduanya perlu dikembangkan secara bersamaan tetapi tidak disamakan.

3. Internalisasi sebagai Fondasi, Bukan Satu-Satunya Penentu Perilaku

Hasil kajian memperlihatkan bahwa hubungan internalisasi dengan perilaku digital sebaiknya dipahami melalui mekanisme dan kondisi yang menyertainya. Nilai Pancasila memberikan dasar pertimbangan, pendidikan dan keluarga menyediakan pengalaman pembentukan, sedangkan pengendalian diri membantu individu menerapkan nilai ketika menghadapi situasi tertentu.

Akan tetapi, perilaku digital tidak hanya dibentuk oleh faktor internal. Seseorang dapat mengetahui bahwa menyebarkan informasi yang belum terverifikasi merupakan tindakan yang tidak tepat, tetapi tetap melakukannya karena tekanan kelompok, keinginan memperoleh perhatian, atau dorongan untuk mengikuti informasi yang sedang ramai. Anonimitas juga dapat mengurangi rasa tanggung jawab dalam interaksi tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya

kemungkinan jarak antara sikap moral dan perilaku nyata. Harrison dan Polizzi (2022) juga memperlihatkan bahwa respons moral remaja terhadap ketidaksantunan daring beragam; dalam survei terhadap remaja berusia 13–16 tahun di Inggris, sekitar seperempat responden memilih respons yang tidak terlibat secara moral.

Karena itu, internalisasi Pancasila sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu fondasi, bukan satu-satunya penyebab perilaku etis. Pendidikan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan digital berperan sebagai kondisi yang dapat memperkuat atau membatasi penerapan nilai. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi memberikan materi tentang Pancasila, tetapi menciptakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik berlatih mengambil keputusan etis.

Pernyataan mengenai identitas nasional juga perlu dipahami secara proporsional. Globalisasi tidak selalu berarti ancaman terhadap identitas nasional. Pengaruh budaya luar dapat menjadi sumber pengetahuan dan pertukaran pengalaman. Tantangan pendidikan justru terletak pada kemampuan peserta didik melakukan seleksi nilai secara kritis sehingga mampu menerima hal yang positif tanpa kehilangan landasan nilai yang menjadi pedoman.

4. Etika Digital sebagai Salah Satu Jalur Kontribusi terhadap Generasi Unggul

Hasil sintesis menunjukkan bahwa hubungan etika digital dengan generasi unggul lebih tepat dijelaskan melalui jalur kontribusi daripada hubungan sebab-akibat langsung. Etika digital dapat mendukung pembentukan kebiasaan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi, tetapi perkembangan generasi muda juga dipengaruhi oleh pendidikan, keterampilan, kondisi sosial, keluarga, dan akses terhadap teknologi.

Dimensi berpikir kritis, misalnya, dapat didukung melalui kebiasaan memeriksa informasi sebelum menyebarkannya. Dimensi komunikasi dapat diperkuat melalui pembiasaan menyampaikan pendapat secara santun dan menghargai perbedaan. Integritas dapat dikembangkan melalui konsistensi antara nilai yang diyakini dan tindakan yang dilakukan di ruang digital. Sementara itu, kolaborasi dapat didukung melalui kebiasaan bekerja sama secara bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan dalam interaksi digital.

Dalam konteks pendidikan Indonesia, implikasi yang lebih konkret adalah perlunya pembelajaran yang menghubungkan nilai Pancasila dengan situasi digital yang benar-benar dihadapi peserta didik. Pembelajaran dapat menggunakan kasus sederhana seperti informasi palsu, komentar yang merendahkan, perbedaan pendapat dalam grup, atau penggunaan data pribadi. Peserta didik kemudian tidak hanya diminta menentukan benar atau salah, tetapi juga menjelaskan nilai Pancasila yang berkaitan, alasan pengambilan keputusan, serta kemungkinan dampaknya. Sartika et al. (2022) juga menyatakan bahwa materi pendidikan Pancasila perlu disesuaikan dengan perkembangan era digital serta dikemas secara lebih kreatif dan menarik.

Indonesia Emas 2045 dalam pembahasan ini ditempatkan sebagai orientasi kebijakan jangka panjang. Kajian tidak menyatakan bahwa internalisasi Pancasila atau etika digital secara langsung menghasilkan Indonesia Emas 2045 karena kesimpulan tersebut membutuhkan bukti empiris dan melibatkan banyak faktor lain.

5. Tantangan Internalisasi dalam Lingkungan Digital

Tantangan internalisasi perlu dipahami pada beberapa tingkat. Pada tingkat individu, persoalan utama adalah kemampuan mengendalikan diri dan menilai informasi. Pada tingkat keluarga dan sekolah, tantangannya adalah konsistensi pembiasaan, keteladanan, serta pendampingan. Pada tingkat masyarakat, budaya komunikasi dapat membentuk kebiasaan yang mendukung atau justru melemahkan perilaku etis. Sementara itu, pada tingkat platform digital terdapat karakteristik teknologi yang ikut membentuk pengalaman pengguna.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak dapat hanya dibebankan kepada pengguna. Kemampuan individu tetap penting, tetapi pengguna berinteraksi dengan sistem digital yang memiliki karakteristik tertentu. Arus informasi yang cepat, desain platform, mekanisme penyebaran konten, dan perhatian pengguna terhadap konten tertentu dapat memengaruhi informasi yang diterima dan bagaimana seseorang meresponsnya. Bhargava dan Velasquez (2021) bahkan berargumen bahwa platform media sosial kerap dirancang agar penggunanya kecanduan, sehingga persoalan perilaku daring tidak sepenuhnya dapat dibebankan pada kemauan individu.

Tantangan lainnya adalah dilema etis antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap orang lain. Pendidikan etika digital tidak seharusnya hanya mengajarkan peserta didik untuk diam atau menghindari perbedaan pendapat. Sebaliknya, peserta didik perlu belajar menyampaikan pendapat secara bebas tetapi bertanggung jawab, membedakan kritik dengan penghinaan, serta mempertimbangkan dampak dari informasi yang dibagikan.

Dengan demikian, tantangan yang paling mendasar bukan hanya banyaknya informasi atau masuknya budaya luar, tetapi kemampuan individu dan lingkungan pendidikan untuk membantu pengguna membuat keputusan yang etis dalam kondisi digital yang kompleks, sebagaimana ditekankan Triyanto (2020) yang menempatkan kemampuan siswa mengambil keputusan etis di lingkungan digital sebagai tantangan utama. Posisi ini membuat pembahasan lebih menekankan mekanisme daripada sekadar daftar masalah.

6. Strategi Penguatan dan Implikasi bagi Pendidikan di Indonesia

Berdasarkan hasil sintesis, pendidikan merupakan salah satu ruang paling penting untuk menghubungkan nilai Pancasila dengan pengalaman digital peserta didik. Namun, penguatan tidak cukup dilakukan melalui penambahan materi. Nilai perlu dihadirkan dalam kegiatan yang memungkinkan peserta didik mengalami, mendiskusikan, dan mempraktikkannya.

Sebagai contoh, guru dapat memberikan aktivitas verifikasi informasi dengan meminta peserta didik membandingkan dua sumber sebelum menentukan informasi yang dapat dipercaya. Guru juga dapat memberikan simulasi percakapan di media sosial untuk melatih cara menyampaikan pendapat ketika terdapat perbedaan. Dalam pembelajaran lain, peserta didik dapat

diminta menganalisis kasus penyebaran data pribadi dan menjelaskan tindakan yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Indikator keberhasilan tidak harus berupa hafalan mengenai Pancasila, tetapi dapat dilihat dari perubahan kemampuan dan perilaku, seperti kemampuan memeriksa sumber informasi, memberikan alasan yang logis, menghargai perbedaan, menggunakan bahasa yang santun, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan memahami pentingnya perlindungan data.

Keluarga dapat memperkuat proses tersebut melalui keteladanan, pendampingan, dan dialog etis. Pendampingan tidak hanya berbentuk pembatasan penggunaan teknologi, tetapi juga pembicaraan mengenai alasan suatu tindakan dianggap tepat atau tidak tepat. Sekolah dan orang tua dapat bekerja sama melalui komunikasi mengenai kebiasaan digital peserta didik sehingga pesan yang diterima di sekolah dan di rumah tidak saling bertentangan.

Masyarakat dapat mendukung melalui kegiatan literasi dan budaya komunikasi yang sehat, sedangkan pemerintah dapat memperkuat lingkungan melalui kebijakan dan program pendidikan digital. Pemanfaatan konten digital juga dapat dilakukan sebagai sarana pembelajaran, tetapi efektivitas konten tersebut tidak dapat langsung dinyatakan tanpa evaluasi empiris. Sebagai gambaran, Tapingkae et al. (2020) meneliti pengaruh pendekatan permainan kontekstual berbasis penilaian formatif terhadap perilaku kewargaan digital, motivasi belajar, dan persepsi siswa, sehingga strategi semacam ini dapat dan perlu dievaluasi secara empiris.

Penerapan strategi tersebut juga memiliki prasyarat. Guru perlu memiliki kompetensi untuk mengintegrasikan etika digital ke dalam pembelajaran, orang tua membutuhkan pemahaman yang memadai untuk memberikan pendampingan, akses teknologi perlu disesuaikan dengan kondisi peserta didik, dan materi harus sesuai dengan tingkat perkembangan usia. Selain itu, strategi pendidikan memiliki keterbatasan apabila lingkungan digital yang lebih luas justru memberikan contoh perilaku yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan.

Dengan demikian, kontribusi utama kajian ini bukan menyatakan bahwa satu strategi tertentu dapat menyelesaikan persoalan etika digital, tetapi menawarkan hubungan konseptual antara nilai Pancasila, proses internalisasi, kompetensi pendukung, lingkungan pembentukan, dan perilaku digital. Kerangka tersebut dapat menjadi dasar untuk mengembangkan pembelajaran etika digital yang lebih kontekstual di Indonesia. Namun, efektivitas model dan strategi tersebut tetap memerlukan penelitian empiris pada peserta didik, sekolah, keluarga, maupun lingkungan digital yang berbeda.

Kesimpulan

Kajian konseptual ini memberikan jawaban terstruktur terhadap pertanyaan penelitian. Pertama, proses internalisasi nilai Pancasila menjadi dasar pembentukan etika digital melalui tahapan dari penguasaan kognitif (*knowing*), pemahaman moral (*understanding*), hingga penghayatan yang mewujud dalam pertimbangan moral dan pengendalian diri (*self-regulation*) saat berinteraksi di ruang digital. Kedua, perwujudan nilai Pancasila diejawantahkan secara konkret ke dalam indikator perilaku digital: Sila Ketuhanan mendasari verifikasi informasi dan kejujuran; Sila Kemanusiaan mengarahkan penghormatan martabat diri dan penolakan *cyberbullying*; Sila Persatuan mendorong toleransi serta penolakan konten provokatif; Sila Kerakyatan melandasi dialog santun dan penghargaan perbedaan pendapat; serta Sila Keadilan Sosial mengarahkan penggunaan teknologi secara adil dan perlindungan data pribadi. Ketiga, etika digital berbasis Pancasila mendukung pembentukan karakter generasi muda secara kontribusional melalui penguatan dimensi berpikir kritis, integritas, dan komunikasi santun, bukan sebagai variabel kausal tunggal.

Kontribusi teoretis utama artikel ini terletak pada perumusan kerangka konseptual terintegrasi yang memetakan hubungan antarkomponen: nilai normatif Pancasila sebagai fondasi, pendidikan dan pembiasaan sebagai jalur internalisasi, literasi digital sebagai kompetensi pendukung, serta variabel lingkungan (keluarga, sekolah, dan karakteristik platform digital) sebagai faktor pemoderasi perilaku etis digital. Kajian ini menjembatani kesenjangan literatur terdahulu yang cenderung membahas Pancasila, etika digital, dan pendidikan karakter secara terpisah. Meskipun demikian, kerangka yang dihasilkan berkedudukan sebagai proposisi teoretis konseptual (*bagaimana seharusnya* proses dan hubungan nilai terbentuk), sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai bukti empiris tentang efektivitas implementasi maupun jaminan kausal terhadap pembentukan karakter unggul secara nasional.

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis. Sebagai studi kepustakaan naratif, analisis ini dibatasi pada literatur berbahasa Indonesia dan Inggris yang dapat diakses secara terbuka, sehingga berpotensi mengeksklusi publikasi lain yang relevan. Selain itu, penelusuran pustaka bersifat purposif-terarah tanpa menggunakan protokol tinjauan sistematis (*systematic literature review*) tertutup, yang membuka kemungkinan timbulnya bias seleksi (*selection bias*) serta subjektivitas dalam sintesis sumber. Ketiadaan data primer juga membuat kerangka hubungan antarkomponen dalam artikel ini belum teruji secara kuantitatif maupun kualitatif di lapangan.

Berdasarkan hasil sintesis konseptual tersebut, dirumuskan dua arah rekomendasi. Secara praktis, lembaga pendidikan hendaknya merancang pembelajaran etika digital berbasis Pancasila yang berfokus pada analisis dilema etis kontekstual seperti penyebaran disinformasi, perundungan siber, dan privasi data melalui simulasi dan studi kasus, daripada sekadar pengajaran dogmatis berbasis hafalan. Secara akademis, penelitian lanjutan direkomendasikan untuk melakukan pengujian empiris terhadap kerangka konseptual ini melalui pendekatan kuantitatif guna mengukur pengaruh efektivitas internalisasi. terhadap

perilaku digital.,serta pendekatan kualitatif-etnografis untuk mengamati penerapan etika digital pada berbagai jenjang pendidikan dan karakteristik platform media sosial.

Referensi

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2020). Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Bhargava, V. R., & Velasquez, M. (2021). Ethics of the attention economy: The problem of social media addiction. Business Ethics Quarterly, 31(3), 321-359. https://doi.org/10.1017/beq.2020.32

Harrison, T., & Polizzi, G. (2022). (In)civility and adolescents' moral decision making online: Drawing on moral theory to advance digital citizenship education. Education and Information Technologies, 27(3), 3277-3297. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10710-0

Hidayat, M., Abdul Rozak, R. W., Hakam, K. A., Kembara, M. D., & Parhan, M. (2022). Character education in Indonesia: How is it internalized and implemented in virtual learning? Jurnal Cakrawala Pendidikan, 41(1), 186-198. https://doi.org/10.21831/cp.v41i1.45920

Julianto, I. R., Moybeka, A. M. S., & Saputro, I. E. (2025). Social media literacy based on Pancasila values as a strategy for strengthening digital ethics and preventing online hate speech among university students. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(4), 1-14. https://doi.org/10.61132/jupancasila.v1i4.339

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). Modul literasi digital: Etika digital.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). Penguatan pendidikan karakter (PPK).

Koesoema, A. D. (2010). Pendidikan karakter: Strategi mendidik anak di zaman global. Grasindo.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Noviannda, R., Oviana, W., & Emalfida. (2020). Internalisasi nilai karakter siswa di madrasah ibtidaiyah. FITRAH: International Islamic Education Journal, 2(2), 15-36. https://doi.org/10.22373/fitrah.v2i2.603

Pamungkas, P. D. A., Rusmawan, U., Hati, K., Siregar, R. R. A., Indrawan, H. E., & Purwatmini, N. (2024). Digital ethics mahasiswa perguruan tinggi swasta di Jakarta menggunakan framework digital literacy KOMINFO. ISBI, 8(2). https://doi.org/10.51211/isbi.v8i2.2593

Samani, M., & Hariyanto. (2012). Pendidikan karakter. Remaja Rosdakarya.

Sartika, R., Praja, W. N., & Azis, A. (2022). Sustainable development goals: Recognition of Pancasila education materials in shaping student ethics in the digital era. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 19(2), 303-309. https://doi.org/10.21831/jc.v19i2.48285

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Tapingkae, P., Panjaburee, P., Hwang, G.-J., & Srisawasdi, N. (2020). Effects of a formative assessment-based contextual gaming approach on students' digital citizenship behaviours, learning motivations, and perceptions. Computers & Education, 159, Article 103998. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103998

Triyanto, T. (2020). Peluang dan tantangan pendidikan karakter di era digital. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 17(2), 175-184. https://doi.org/10.21831/jc.v17i2.35476

Yusuf, N., Wibowo, A. P., & Budiono. (2024). Digital citizenship education: Pancasila as a source of digital ethics in Indonesia. JED (Jurnal Etika Demokrasi), 9(1), 70-83. https://doi.org/10.26618/jed.v9i1.11721